

## RINGKASAN

**FAKTOR-FAKTOR ORGANISASIONAL DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP PROFESIONALISME APARATUR  
KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO**

**Dony Eko Satriyo**

Reorganisasi telah dilaksanakan Ditjen Pajak sejak tahun 2002. Selama waktu tersebut institusi ini telah berkembang pesat menjadi institusi yang mengedepankan integritas, transparansi dan efektivitas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi maupun untuk masyarakat. Akan tetapi seiring dengan waktu terdapat perubahan dimana institusi cenderung lebih *rule-driven professionalism* daripada *mission-driven professionalism*. Birokrasi cenderung mengikuti aturan formal daripada visi/misi yang ada. Dengan begitu secara tidak langsung dapat berdampak pada pelayanan, tingkat respon, dan inovasi yang mana merupakan komponen dari profesionalisme dalam rangka mencapai *good government*.

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan sampel penelitian seluruh pegawai. Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisa pengaruh 1. pemahaman visi-misi organisasi terhadap profesionalisme, 2. kepemimpinan terhadap profesionalisme, 3. struktur organisasi terhadap profesionalisme, dan 4. sistem penghargaan terhadap profesionalisme. Adapun metode yang digunakan yaitu *Struktural Equation Modeling* (SEM).

Berdasarkan pengoiahan 88 sampel data responden, dan diolah dengan metode SEM, maka didapat ; 1. pemahaman visi-misi organisasi berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme pegawai ( $\gamma = 0,302$ ;  $p = 0,013 < 0,05$ ), 2. struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme pegawai ( $\gamma = 0,742$ ;  $p = 0,004 < 0,05$ ), sedangkan 3. Kepemimpinan dan penghargaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme ( $\gamma = -0,785$ ;  $p = 0,782 > 0,05$ ), ( $\gamma = 0,085$ ;  $p = 0,747 > 0,05$ ).

Dengan hasil penelitian tersebut, disamping memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan diharapkan menjadi input penting bagi manajemen KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan memperbaiki struktur organisasi yang lebih mengutamakan delegasi wewenang. Dengan demikian pegawai dapat secara profesional, independen melaksanakan tugas-tugasnya.